

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pada 26 Agustus 2019 Presiden Republik Indonesia resmi mengumumkan rencana pemindahan ibu kota Indonesia dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur, dalam keterangannya, telah memutuskan sebagian wilayah Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kartanegara sebagai lokasi pembangunan ibu kota baru Republik Indonesia (Mardiansyah, 2021). Alasannya adalah karena resiko bencana yang minim, kawasan tersebut juga dinilai cukup strategis diantara kota-kota yang berkembang, yakni kota Balikpapan dan Samarinda. Dalam rencana pemindahan ibukota ini, diproyeksikan dapat menumbuhkan berbagai sektor di wilayah Kalimantan Timur (Hasibuan, 2019). Presiden juga menyatakan bahwa inilah lokasi yang paling ideal karena telah melalui dua kajian, yakni struktur tanah dan dampak ekonomi. Disamping itu, banyak pakar yang menyetakan bahwa pemindahan ibu kota negara akan mendorong investasi ke provinsi ibu kota baru (Malisan *et al.*, 2021). Pemerintah Republik Indonesia juga berpendapat Kalimantan Timur memiliki beberapa keunggulan

seperti (1) Dua bandara internasional utama dekat dengan ibu kota (Sultan Aji Muhammad Sulaiman Bandara Internasional dan Aji Pangeran Tumenggung Pranoto), (2) Kalimantan Timur memiliki akses Tol Balikpapan-Samarinda yang membentang 99,35 kilometer (KM), (3) Calon ibu kota juga memiliki akses ke Pelabuhan Semayang, (4) Kalimantan Timur juga memiliki jaringan energi dan sumber daya air bersih, (5) Kalimantan Timur memiliki struktur demografi yang heterogen berarti sebagian besar penduduk Kalimantan Timur adalah pendatang dan mudah beradaptasi dengan perubahan (Nur Azhar, Putri Fatima and Tamas, 2020).

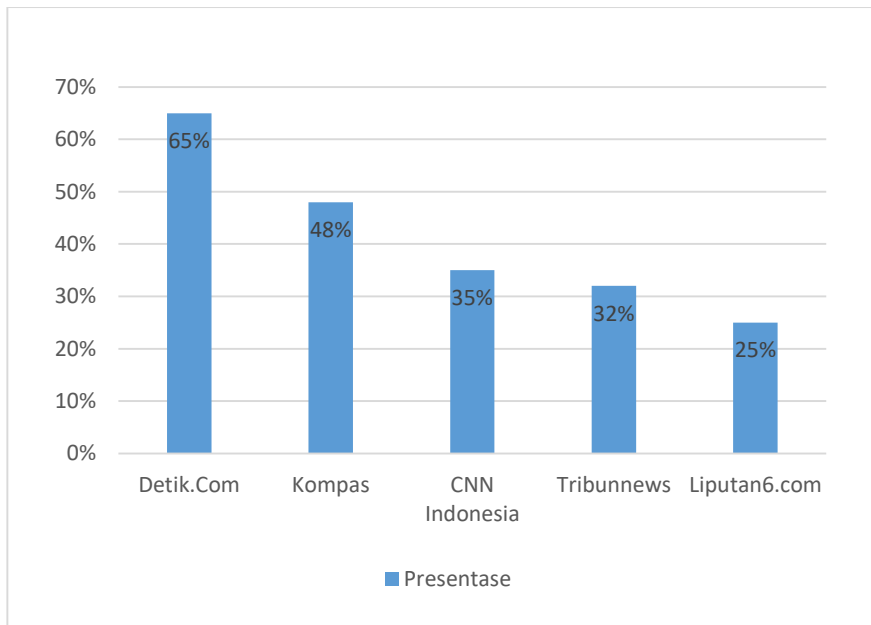
Adanya rencana pemindahan ini tentunya terdapat berbagai pendapat dari berbagai pihak. Pro dan kontra tentu akan bermunculan seiring dengan adanya rencana pemindahan yang sedang hangat dibahas ini. Dengan perkembangan teknologi, Rencana pemindahan Ibu kota pun semakin meluas dengan cepat. Masyarakat kerap kali menggunakan media massa untuk memperoleh informasi. Dengan perkembangan teknologi, terciptalah internet sebagai salah satu cara mengakses “news

media”atau media online (Alifia Pradyanti, Antar Venus, 2020). Banyak diantara masyarakat yang mendukung penuh dengan keputusan pemerintah ini karena dilihat sebagai salah satu bentuk untuk mengistirahatkan Jakarta yang dinilai sudah tidak mumpuni dan pemindahan ibu kota diharapkan membantu pembangunan infrastruktur sebagai salah satu misi pemerataan pembangunan Indonesia. Namun tidak sedikit juga masyarakat dari berbagai elemen menolak rencana hijrah ibu kota ini karena dianggap hanya menyulitkan keuangan negara (Mardhiyah, 2020). Perdebatan mulai terjadi mengenai berapa total anggaran yang dibutuhkan oleh pemerintah, hingga wajah Kota Jakarta kedepannya (Juniardi, 2019). Jika ibu kota dipindahkan, permasalahan yang akan muncul terkait permasalahan infrastruktur dan bagaimana jenis pengaturan nantinya, termasuk apabila pemindahan ibu kota dilakukan maka akan terjadi perubahan tatanan yang luar biasa (Yahya, 2018). Perdebatan dan statement-statement yang bermunculan tentunya tak luput dari liputan berbagai media. Bahkan berita mengenai dampak yang terjadi dari pemindahan ibu kota ini masih beredar luas hingga saat ini di laman Detik.com,

Kompas, CNN Indonesia, Tribunnews, dan Liputan6.com. Langkah yang diambil oleh Presiden Jokowi ini tentu cukup menyita perhatian sebagian besar masyarakat yang kemudian membuat media-media cetak maupun online menjadi berlomba-lomba untuk melaporkan kabar terkini, terkait dengan pemindahan lokasi Ibu Kota Indonesia, Media Detik.com, Kompas, CNN Indonesia, Tribunnews, Liputan6.com, yang sejak 26 Agustus hingga tanggal 16 Oktober 2022 telah mengeluarkan kurang lebih 300 berita terkait dengan pemindahan ibu kota.

**Gambar 1.1.** Presentase Peminat Portal Media Online Nasional

Tahun 2022



Sumber: (Kominfo, 2022)

Gambar 1 menggambarkan bahwa media online paling banyak dikonsumsi warga Indonesia tahun 2022. Detikcom menjadi media daring dengan konsumsi terbesar sebanyak 65%. Persentase ini jauh mengungguli Kompas *online* yang sebesar 48%. Posisi ketiga ditempati CNN Indonesia dengan persentase 35%. Selanjutnya, ada Tribunnews dengan 32%

dan Liputan6 dengan 25%. Dari penjabaran di atas, peneliti menganggap bahwa tema ini penting diangkat untuk melihat bagaimana sikap media di Indonesia dalam memberitakan tentang keputusan pemindahan ibu kota. Alasan mengapa Detik.com, Kompas, CNN Indonesia, Tribunnews, Liputan6 dipilih menjadi media yang diteliti adalah, karena lima media online tersebut sama-sama merupakan portal berita yang ruang lingkungannya nasional dan secara aktif memberikan informasi berita-berita terupdate dan dapat diakses dengan mudah oleh publik.

Rencana pemindahan ibu kota Indonesia ditetapkan untuk menggantikan Kota Jakarta yang sudah terlalu penuh, berpolusi, rentan banjir, macet lalu lintas, memiliki resiko bencana terutama gempa bumi, dan saat ini datarannya secara perlahan mulai tenggelam yang merupakan hasil penelitian berbagai pihak (Aufa Hanum Salsabila, 2020). Presiden menekankan bahwa ibu kota baru tersebut nantinya tak hanya berarti sebagai simbol identitas bangsa, tapi juga sebagai representasi kemajuan bangsa (Ristawati, 2020). Alasan pemindahan adalah untuk mengurangi ketimpangan, pemeratakan pembangunan, dan menumbuhkan

pusat ekonomi baru, selain karena alasan daya dukung dan daya tampung Pulau Jawa yang terus berkurang. Dalam perjalanan panjangnya sebagai ibukota sekaligus pusat pertumbuhan nasional, Jakarta telah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia (Herdiawan, 2021). Pemandangan ibu kota sudah digulirkan sejak lama, bahkan sejak era kepemimpinan Presiden ke-1 Republik Indonesia Ir Soekarno namun keinginan itu belum juga dapat terealisasi (Putri, 2021). Sebelumnya, selama pemerintahan Soekarno, pemindahan ibu kota disebutkan ketika Soekarno meresmikan Palangkaraya sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 1957. Pada tahun 1965, Soekarno juga menyebut Palangkaraya sebagai calon ibu kota negara. Kemudian selama Era Suharto, ide pemindahan ibu kota muncul dengan mengusulkan daerah Jonggol, Bogor sebagai ibu kota negara. Beralih ke pemerintahan SBY pada Oktober 2010, saat itu Kali ini SBY menawarkan sejumlah opsi untuk mengatasi kemacetan di Ibu Kota Jakarta. Yaitu mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota dengan reformasi total, Jakarta tetap ibu kota, tetapi pusat pemerintahan telah dipindahkan ke daerah lain

(Azmy, 2021). Pemindahan Ibu kota baru ini diharapkan menjadi “kota yang cerdas, hijau, indah, dan berkelanjutan”, dengan menyediakan kualitas hidup yang tinggi untuk 1,5 juta penduduk yang diproyeksikan dengan ruang hijau yang luas, tidak seperti kepadatan penduduk dan menenggelamkan Jakarta (Hoong Chen Teo, Alex Mark Lechner, 2020).

Saat ini, pemerintah kembali membahas pemindahan ibu kota karena Jakarta dianggap tidak layak lagi menjadi ibu kota negara Republik Indonesia. Selain itu, letaknya yang lebih jauh ke bagian barat Indonesia dituding sebagai penyebab tingginya tingkat ketimpangan antar wilayah di tanah air. Alasan pemindahan ibukota selain kepada faktor internal yang ada di Indonesia juga bercermin dari keberhasilan pemindahan ibukota yang telah dilakukan di beberapa negara seperti Amerika Serikat yang memindahkan ibu kotanya dari New York ke Washington DC. Negara Brazil yang memindahkan ibu kota dari Salvador ke Rio de Janeiro. Negara Jerman yang memindahkan ibu kotanya dari Bonn ke Berlin. Bahkan negara dalam satu kawasan ASEAN seperti Negara Malaysia yang memindahkan ibu kota negara dari



Kuala Lumpur ke Putrajaya yang dianggap berhasil. Keberhasilan pemindahan ibukota negara yang telah dilakukan di negaranegara tersebut diharapkan dapat terwujud dalam pemindahan ibukota yang tengah dilaksanakan di Indonesia (Herdiana, 2022). Oleh karena itu, saat ini sedang dibahas untuk membangun luar biasa mega proyek yaitu pemindahan ibu kota dari semula di kota jakarta ke daerah lain yang dianggap lebih potensial dan memiliki daya dukung wilayah yang lebih baik (Edi Sutoyo, 2020). Pemindahan ibu kota bukanlah rencana baru di Indonesia, dengan isu yang relatif sama yakni permasalahan lingkungan DKI Jakarta yang kelebihan muatan. Isu ini kembali ramai setelah Presiden Republik Indonesia terpilih (Hamdani, 2020).

Rencana pemindahan merupakan bagian dari kepentingan bangsa dan sebagai upaya menyongsong persaingan global (Primandani Arsi, 2021). Rencana pemindahan ini otomatis mendapat perhatian luas dari media, khususnya media online. Ratusan berita, komentar para ahli, pemerintah, dan masyarakat lokal tentang rencana pemindahan ini tersebar di media (Dwiani Septiana, 2018). Media berperan dalam terciptanya opini yang

beredar di kalangan masyarakat. Suatu opini terbentuk dari persepsi atau pandangan dari masing-masing individu. Biasanya opini publik sangat responsif terhadap pemberitaan dengan isu yang sedang trending yang diberikan oleh media berita (Akhdiva Elfi Istiqoh, Zuly Qodir, 2022). Opini publik yang muncul dari kalangan masyarakat dan kelompok kepentingan tersebut dapat mempengaruhi suatu kebijakan (Akhdiva Elfi Istiqoh, Zuly Qodir, 2022). Peran narasi media sebagai aktor menginformasikan narasi publik, yang dapat mengintervensi kebijakan pemerintah (Suswanta, Danang Kurniawan, Achmad Nurmandi, 2021).

Penelitian tentang kebijakan pemindahan ibu kota sudah banyak dilakukan, Penelitian (Shalih *et al.*, 2018) yang melihat kesiapan pemerintah provinsi Kalimantan Tengah dalam Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia ke Kota Palangkaraya. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kalimantan Tengah menyatakan kesiapan dan persetujuan terkait wacana yang digulirkan oleh pemerintah pusat tersebut, namun gubernur Provinsi Kalteng mengingatkan ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan jika wacana tersebut

benar-benar akan diwujudkan. meskipun pemerintah daerah Kalteng sudah menyatakan kesiapannya, namun banyak faktor yang perlu untuk diperhatikan, terutama aspek sosial, politik, birokrasi, dan daya dukung lingkungan hidup. Penelitian yang dilakukan (Aditya and Fuadi, 2021) terkait Konseptualisasi Omnibus Law dalam Pemindahan Ibukota Negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pemindahan ibukota negara harus ada harmonisasi puluhan undang-undang hingga peraturan daerah ke dalam undang-undang ibukota negara. Penggunaan omnibus law dalam pemindahan ibukota negara merupakan pilihan yang relevan dalam menyederhanakan regulasi untuk menunjang kebijakan pemindahan ibukota negara. Kemudian penelitian (Taufiq, 2020) yang melihat Pemindahan Ibu Kota Dan Potensi Konektivitas Pemerataan Ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya peluang dalam menciptakan pemerataan ekonomi melalui kebijakan pemindahan ibu kota dengan asumsi akan munculnya pusat-pusat pertumbuhan skala nasional baru di luar Pulau Jawa. Arus migrasi penduduk,

investasi, konektifitas internal dan konektivitas eksternal menjadi unsur-unsur yang mampu mewujudkan hal tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menganalisis Bagaimana Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Baru di Indonesia dilihat dari narasi publik yang terbangun dari media. Untuk melihat narasi publik tersebut akan dilakukan studi Narrative Policy Framework (NPF) yang dapat mendeskripsikan, menjelaskan struktur narasi dalam pembuatan atau penerepan suatu kebijakan. Pertimbangan mendasar penelitian ini dibuat karena banyak kontroversi pada penerapan Kebijakan Pemindahan Ibu Kota di masyarakat maupun pada aktor aktor politik di Indonesia. Oleh karena itu Penulis ingin meneliti rencana pemindahan tersebut dengan judul: Narrative Policy Framework: Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Baru Di Indonesia.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari ulasan singkat mengenai latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat merumuskan suatu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Kerangka Narasi Kebijakan pada media Detik.com, Kompas, CNN Indonesia, Tribunnews, Liputan6.com dalam Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Baru di Indonesia?
2. Bagaimana Struktur Berita di Media Detik.com, Kompas, CNN Indonesia, Tribunnews, Liputan6.com Dalam Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Baru Indonesia?

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya. Maka penelitian ini memuat tujuan, yaitu :

1. Untuk menganalisis Bagaimana Kerangka Narasi Kebijakan pada media Detik.com, Kompas, CNN Indonesia, Tribunnews, Liputan6.com dalam Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Baru di Indonesia.
2. Untuk menganalisis Bagaimana Struktur Berita di Media Detik.com, Kompas, CNN Indonesia,

Tribunnews, Liputan6.com Dalam Kebijakan  
Pemindahan Ibu Kota Baru Indonesia.

### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

1. Dalam aspek akademik, hasil dari penelitian ini diharapkan untuk: Pertama, Menambah ilmu pengetahuan terkait pemindahan ibu kota baru di indonesia melalui narrative policy framework. Kedua, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya khususnya yang berkaitan dengan tema penelitian.
2. Dalam aspek praktis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan: Pertama, salah satu upaya untuk mengetahui terkait kebijakan pemindahan ibu kota baru di indonesia. Kedua, sebagai usaha untuk mengetahui respon masyarakat terkait kebijakan pemindahan ibu kota baru di indonesia. Ketiga, sebagai referensi bahan bacaan yang menarik bagi masyarakat luas maupun pemerintah, terkait kebijakan pemindahan ibu kota baru di indonesia.